



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMBO DALLE
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 170458

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.940.570.500

1. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/300 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 647.300.000
4. Tanah Seluas 1258 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 60.384.000
5. Tanah Seluas 8500 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 42.500.000
6. Tanah Seluas 5062 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 17.717.000
7. Tanah Seluas 19997 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 69.989.500
8. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/78 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 262.680.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 210.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2,7 G AUTO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ZZE122R-GEPEKD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 812.080.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	918.574.533
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.881.225.033
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.881.225.033

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.